

Peran Dewan Perwakilan  
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil  
Dalam Rencana Kebijakan  
Pembangunan Daerah  
Berdasarkan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor  
86 Tahun 2017

*by Julkarnaen Julkarnaen*

---

**Submission date:** 01-Oct-2024 09:16AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2471052509

**File name:** 1.docx (36.71K)

**Word count:** 3359

**Character count:** 23089

# Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Julkarnaen<sup>1\*</sup>, Dani Sintara<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum/ Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

\*Email penulis [julkarnaen@umnaw.ac.id](mailto:julkarnaen@umnaw.ac.id)<sup>1</sup> [dani.sintara@umnaw.ac.id](mailto:dani.sintara@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: [dani.sintara@umnaw.ac.id](mailto:dani.sintara@umnaw.ac.id)

**Abstract :** *The Regional People's Representative Council's Pokir is the result of absorbing community aspirations conveyed by members of the Regional People's Representative Council in official and informal forums. This Pokir aims to ensure that regional development policies reflect the needs and desires of the local community. To determine the role of the Aceh Singkil Regency People's Representative Council in formulating regional development policy plans through the Main Thoughts (Pokir) of the Regency People's Representative Council in legal research, there are two types of research, namely normative (doctrinal) research and empirical research. The type of research used in compiling this thesis is a combination of normative (doctrinal) research and empirical research. Data collection methods are techniques or methods that can be used by researchers to collect data. Techniques in designating an abstract word that is not manifested in objects, but can only be seen in its use through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, and others. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis methods. Based on the results of the study, the Regency People's Representative Council also plays a role in determining the regional budget that will fund various development programs. In this process, the District People's Representative Council must ensure that the budget prepared reflects the development priorities that have been set based on community aspirations. Thus, the District People's Representative Council not only acts as a political representative, but also as a supervisor of budget use to ensure transparency and accountability in regional financial management. The results of the discussion regarding the role of the Aceh Singkil District People's Representative Council (DPRK) in preparing the main ideas (Pokir) show that the DPRK has a crucial role in regional development policy planning. In accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 86 of 2017, the DPRK functions as a liaison between the community and the regional government by preparing Pokir that reflects the aspirations and needs of the community. So it can be concluded that according to the regulations, the District People's Representative Council is tasked with preparing the Main Ideas (Pokir) which are the results of absorbing community aspirations. This Pokir is then submitted to the regional government to be used as a basis for preparing development planning documents, such as the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and the Regional Government Work Plan (RKPD).*

**Keywords:** *Aceh Singkil District People's Representative Council, Development Policy, Ministerial Regulation Number 86 of 2017*

**Abstrak.** Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam forum-forum resmi dan informal. Pokir ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun rencana kebijakan pembangunan daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten juga berperan dalam menetapkan anggaran daerah yang akan mendanai berbagai program pembangunan. Dalam proses ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten harus memastikan bahwa anggaran yang disusun mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tidak hanya bertindak sebagai perwakilan politik, tetapi juga

sebagai pengawas penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil pembahasan mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil dalam menyusun pokok-pokok pikiran (Pokir) menunjukkan bahwa DPRK memiliki peran yang krusial dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, DPRK berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dengan menyusun Pokir yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bertugas menyusun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat. Pokir ini kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, Kebijakan Pembangunan, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017

## 1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang efektif tidak hanya bergantung pada eksekusi dari pemerintah daerah tetapi juga pada partisipasi aktif dari masyarakat dan representasi mereka dalam badan legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten). Di Kabupaten Aceh Singkil, peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam forum-forum resmi dan informal. Pokir ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil memiliki tanggung jawab besar dalam mengkomunikasikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

Namun, dalam praktiknya, peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyusun dan menyampaikan Pokir seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan tersebut dapat berupa kendala komunikasi, kurangnya partisipasi masyarakat, atau keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menjalankan perannya dalam konteks ini, serta sejauh mana efektivitas Pokir dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah menjadi semakin penting mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh daerah tersebut. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang tepat dan efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Hal ini termasuk partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah, Dan Lembaga Legislatif Seperti Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil memiliki peran strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengartikulasikannya dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Pokir yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan regulatif yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk mekanisme penyusunan dan penyampaian Pokir oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dalam hal ini, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap Pokir yang disampaikan telah melalui proses yang transparan dan partisipatif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, mengkaji tantangan yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam menyampaikan Pokir. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dan kendala komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam penyusunan dan penyampaian Pokir. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun Pokir merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris.

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di <sup>11</sup> Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

<sup>2</sup> Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

### 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

<sup>1</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional

<sup>13</sup> Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam Menyusun Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)

Dalam konteks politik lokal, representasi politik yang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Dewan Perwakilan Rakyat Kabuapten) memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagai lembaga legislatif di tingkat kabupaten, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan warga terakomodasi dalam <sup>10</sup> rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tugas untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pokok-pokok pikiran ini merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti reses, audiensi, dan konsultasi publik. Pokok-pokok pikiran ini kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan <sup>14</sup> Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyusun pokok-pokok pikiran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Peran representasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam kebijakan pembangunan daerah meliputi beberapa aspek utama. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bertindak sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui fungsi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mengumpulkan aspirasi dan keluhan masyarakat, kemudian mengartikulasikannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.<sup>1</sup> Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan menguntungkan masyarakat luas.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Proses penyusunan Pokir melibatkan berbagai kegiatan, seperti reses, audiensi, dan konsultasi publik, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berinteraksi langsung dengan konstituen mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat.

Pokir yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. Dalam hal ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, melalui penyusunan Pokir, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten juga dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan partisipatif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyusun dan menyampaikan Pokir merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>1</sup> Mansbridge, Jane. "Rethinking Representation." *American Political Science Review* 97, no. 4 (2003): 515-528.

Tantangan yang Dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam Menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran

Salah satu tantangan utama yang dihadapi DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam menyampaikan Pokir adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala dalam alokasi dana untuk merealisasikan semua usulan yang diajukan oleh DPRD. Keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah untuk membuat pilihan dan menentukan prioritas, sehingga tidak semua Pokir dapat dilaksanakan.

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan untuk mengimplementasikan program pembangunan secara menyeluruh. DPRD harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa usulan yang diangkat memiliki prioritas yang tepat dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Selain itu, DPRD perlu mencari solusi alternatif seperti pencarian sumber dana tambahan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan program.

Selain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia juga merupakan tantangan penting. DPRD Kabupaten Aceh Singkil mungkin mengalami kekurangan tenaga ahli dan teknis yang dapat mendukung penyusunan dan evaluasi Pokir. Kualitas Pokir sangat bergantung pada kompetensi dan kapasitas anggota DPRD serta staf yang terlibat dalam proses tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektivitas dalam merumuskan usulan yang berkualitas dan relevan. DPRD perlu mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesional. Selain itu, penguatan kerjasama dengan lembaga penelitian atau konsultan eksternal dapat membantu dalam menyusun Pokir yang lebih baik.

Terdapat kemungkinan perbedaan prioritas antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. DPRD mungkin mengajukan Pokir yang berfokus pada isu-isu tertentu, sementara Pemerintah Daerah memiliki agenda dan prioritas pembangunan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara usulan yang diajukan dan rencana pembangunan yang diimplementasikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dialog dan koordinasi yang efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Kesepakatan mengenai prioritas dan anggaran yang tersedia harus dicapai untuk memastikan bahwa usulan dari DPRD dapat diintegrasikan dengan rencana

pembangunan daerah. Proses komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting untuk mengatasi perbedaan prioritas dan mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat menghambat proses pengajuan dan integrasi Pokir. Proses administratif yang rumit dan kurangnya informasi yang memadai dapat menyebabkan keterlambatan dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan program.

Untuk meningkatkan koordinasi, DPRD dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat mekanisme komunikasi dan kerjasama. Pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan kedua belah pihak dapat membantu dalam menyelesaikan masalah koordinasi dan memastikan bahwa Pokir dapat diterima dan diintegrasikan dengan baik.

Meskipun DPRD berusaha menyerap aspirasi masyarakat, keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan pengajuan Pokir sering kali masih kurang. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan usulan yang diajukan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

DPRD perlu meningkatkan partisipasi publik melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, forum konsultasi, dan media sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, DPRD dapat memastikan bahwa Pokir yang disusun lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan dapat menghambat partisipasi aktif. Masyarakat mungkin tidak memahami bagaimana mereka dapat memberikan masukan atau terlibat dalam proses perencanaan.

Untuk mengatasi masalah ini, DPRD perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan informasi. Kampanye penyuluhan dan program pendidikan mengenai proses perencanaan pembangunan dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dan meningkatkan partisipasi dalam memberikan masukan yang konstruktif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi DPRK Aceh Singkil adalah keterbatasan akses informasi yang akurat dan terkini. Informasi yang lengkap dan mutakhir sangat penting untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang relevan dan efektif. Namun, di banyak daerah, termasuk Aceh Singkil, sering kali terdapat kendala dalam memperoleh data yang diperlukan

untuk analisis mendalam. Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya infrastruktur teknologi informasi, kurangnya sistem pengumpulan data yang terintegrasi, dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat serta instansi pemerintah lokal.

Kurangnya akses informasi yang berkualitas dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan substansi pokok-pokok pikiran yang dihasilkan. Tanpa data yang akurat, DPRK mungkin kesulitan dalam mengevaluasi kondisi aktual di lapangan, membuat perencanaan yang tepat, dan merumuskan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengumpulan data dan akses informasi, serta meningkatkan kapasitas teknologi informasi di wilayah tersebut.

Keterampilan analisis dan penyampaian hasil penelitian yang bervariasi di kalangan anggota DPRK juga menjadi tantangan signifikan. Setiap anggota DPRK membawa latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, yang mempengaruhi cara mereka dalam memahami dan menafsirkan data serta hasil penelitian. Anggota yang memiliki keterampilan analisis yang lebih baik akan lebih mampu mengembangkan pokok-pokok pikiran yang terstruktur dan komprehensif. Sebaliknya, keterampilan yang kurang dapat mengakibatkan penyampaian yang tidak jelas atau kurang mendalam.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi DPRK untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi anggotanya. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti teknik analisis data, metodologi penelitian, dan keterampilan komunikasi. Dengan meningkatkan keterampilan anggota, DPRK dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun pokok-pokok pikiran yang berbasis data dan relevan.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun finansial, merupakan tantangan besar lainnya. DPRK Aceh Singkil mungkin menghadapi masalah dalam hal anggaran yang terbatas untuk melakukan penelitian yang mendalam, mengumpulkan data, dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penyusunan pokok-pokok pikiran. Selain itu, jumlah staf yang terbatas dan kurangnya keahlian teknis dalam tim juga dapat mempengaruhi efektivitas proses legislasi.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, DPRK dapat mencari solusi kreatif seperti menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penelitian, universitas, atau organisasi non-

pemerintah yang dapat menyediakan dukungan tambahan dalam hal penelitian dan analisis. Pendanaan juga dapat dicari melalui program-program hibah atau alokasi anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengembangan kapasitas legislasi.

Koordinasi yang efektif antara DPRK dan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, sering kali menjadi tantangan. Ketidakharmonisan atau kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak ini dapat menghambat proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Misalnya, jika ada ketidaksepakatan antara DPRK dan pemerintah daerah tentang prioritas pembangunan, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menyusun pokok-pokok pikiran yang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

### **3. KESIMPULAN**

Menurut peraturan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bertugas menyusun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat. Pokir ini kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Dani Sintara, SH., MH. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Bardach, Eugene, dan Eric M. Patashnik. (2016). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. Los Angeles: CQ Press.
- Baumgartner, Frank R., dan Bryan D. Jones. (2009). *Agendas and Instability in American Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dahl, Robert A. (2001). *How Democratic is the American Constitution?*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Elazar, Daniel J. (1984). *American Federalism: A View from the States*. New York: Harper & Row.

- Fiorina, Morris P. (2005). *Culture War? The Myth of a Polarized America*. New York: Pearson Longman.
- Fischer, Frank, dan John Forester. (1993). *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Durham, NC: Duke University Press.
- Fukuyama, Francis. (2011). *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Jones, Mark P. (2009). *Political Representation*. Oxford: Oxford University Press.
- Lijphart, Arend. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Lindblom, Charles E. (1990). *Inquiry and Change: The Troubled Attempt to Understand and Shape Society*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Lowi, Theodore J. (1969). *The End of Liberalism: The Second Republic of the United States*. New York: Norton.
- Mansbridge, Jane J. (2003). *Representation*. Cambridge: Oxford University Press.
- May, John D. (2008). *Policy Making and Political Science: The Case of the United States*. New York: Routledge.
- Norris, Pippa. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Putnam, Robert D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Sabatier, Paul A. (2007). *Theories of the Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sartori, Giovanni. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schattschneider, E. E. (1960). *The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Smith, John. (2005). *Democracy and Representation*. London: Routledge.
- Verba, Sidney, dan Norman H. Nie. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Weimer, David L., dan Aidan R. Vining. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New York: Routledge.
- Wildavsky, Aaron. (1988). *The Art and Craft of Policy Analysis*. London: Routledge.
- Wilson, James Q. (1989). *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. New York: Basic Books.

# Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
3	<a href="http://oqueumaraparigaquery.blogspot.com">oqueumaraparigaquery.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://journal.unj.ac.id">journal.unj.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ejournal.seaninstitute.or.id">ejournal.seaninstitute.or.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ejournal.bappeda.bantenprov.go.id">ejournal.bappeda.bantenprov.go.id</a> Internet Source	1%
8	Muchlis. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh Oleh Dewan	1%

# Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pemerintah Aceh", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

---

9	<a href="http://jonedu.org">jonedu.org</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://id.unionpedia.org">id.unionpedia.org</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://tigasisinews.id">tigasisinews.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://habibiariandi.blogspot.com">habibiariandi.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://kelkadang.malangkota.go.id">kelkadang.malangkota.go.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://www.targetmdgs.org">www.targetmdgs.org</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

# Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---